



MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA

PEDOMAN MITIGASI RESIKO



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
JAKARTA
2020**



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
NOMOR : 34/SK/REKTOR/VIII/2020

TENTANG
PEDOMAN MITIGASI RESIKO

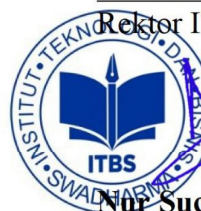
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA,

- Menimbang : 1. Bahwa manajemen resiko merupakan salah satu komponen penting dalam menjamin keberlangsungan jalannya organisasi;
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan ITB Swadharma perlu menetapkan manajemen resiko yang dapat mengevaluasi, mengendalikan dan meminimalkan potensi kerugian akibat terjadinya resiko.
3. Bahwa pemberlakuan pedoman mitigasi resiko ini perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 447/M/2020 tentang Ijin Penggabungan STMIK dan Politeknik Swadharma;
6. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberlakukan pedoman mitigasi resiko ITB Swadharma sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pelaksanaan mitigasi resiko menjadi tanggung jawab atau di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu;
- Ketiga : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 2020
Rektor ITB Swadharma



Nur Suahyo, S.Si, MM

KATA PENGANTAR

Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadiran-Nya karena rahmat taufik serta hidayahnya, kami bisa menyelesaikan pedoman yang berjudul “Manajemen Risiko Institut Teknologi dan Bisnis Swadhara” dengan lancar.

Dalam pembuatan pedoman ini, kami dibantu oleh berbagai pihak sehingga kesulitan yang kami hadapi dalam proses pembuatan pedoman ini bisa diatasi dengan baik dan selesai pada waktu yang telah ditentukan. Tak luput Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai pihak yang telah membantu kami dalam proses pembuatan pedoman ini.

Kami berharap pedoman ini, bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca, serta menjadi inspirasi untuk mengembangkan pengetahuan pembaca tentang Manajemen Risiko pada Institut Teknologi dan Bisnis Swadharna.

Jakarta,

Penyusun

DAFTAR ISI

SK REKTOR	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. <i>Risk-Based Thinking</i> (RBT) dalam ISO 9001:2015	2
C. Prinsip dalam ISO 9001:2015, Sistem Akreditasi Nasional dan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi	4
D. Sistem Manajemen Mutu ITB Swadharma Jakarta.....	7
BAB II TABEL MITIGASI RISIKO	9
BAB III PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi memainkan peran yang dinamis dan positif dalam masyarakat, budaya dan ekonomi suatu negara. Tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia saat ini antara lain adalah pergeseran tuntutan masyarakat akan kualitas lulusan perguruan tinggi (PT) terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan; semakin ketatnya kompetisi lulusan PT dalam memasuki dunia kerja; semakin ketatnya kompetisi PT dalam memperoleh calon mahasiswa, termasuk dengan PT asing; dan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan universitas virtual (*distance learning & virtual university*). Di era liberalisasi dan globalisasi dimana PT saat ini diberi kebebasan dengan status otonominya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas yang memadai. Tantangan-tantangan tersebut menuntut PT untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Ada banyak pengertian mutu yang telah dikembangkan oleh para ahli manajemen organisasi. Juran (1999) mengungkapkan dua pengertian mutu, yaitu (1) mutu berarti fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan pelanggan, dan (2) mutu berarti bebas dari kekurangan - kebebasan dari kesalahan agar tidak mengulang pekerjaan, ketidakpuasan pelanggan, klaim pelanggan, dan sebagainya. Campell dan Rozsnayi (2002) mengelompokkan konsep mutu menjadi beberapa kategori, diantaranya adalah *quality as excellence* (selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik), *quality as "zero errors"* (tidak melakukan kesalahan), *quality as "fitness for purpose"* (kesesuaian tujuan), *quality as transformation* (fokus pada peserta didik), *quality as threshold* (sesuai kriteria tertentu), dan *quality as enhancement or improvement* (peningkatan kualitas secara keberlanjutan). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 menjelaskan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Untuk menjawab tantangan-tantangan di atas dan membentuk budaya mutu maka perlu dikembangkan sistem perbaikan mutu berkelanjutan melalui suatu Sistem Manajemen Mutu. Sistem manajemen mutu (SMM) adalah sistem formal yang mendokumentasikan proses, prosedur, dan tanggung jawab untuk mencapai kebijakan dan sasaran mutu. SMM membantu mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara terus menerus (<http://asq.org/learn-about-quality/quality-management-system/>, diakses 25 Agustus 2016). Salah satu standar internasional yang menetapkan dan menerapkan SMM adalah *International Organization for Standardization* (ISO), khususnya ISO 9001, yang secara luas telah digunakan oleh banyak organisasi di dunia.

Berdasarkan sejarahnya, ISO 9001 diperkenalkan pada tahun 1987 (ISO 9001:1987 untuk penjaminan mutu (*quality assurance/QA*) dalam desain, pengembangan, produksi, instalasi dan pelayanan bagi organisasi yang memiliki aktivitas menciptakan produk baru. Pada tahun 2000 keluar ISO 9001:2000 yang memadukan tiga standar penjaminan mutu (ISO 9001, 9002, dan 9003) menjadi hanya satu standar yaitu 9001. ISO 9001:2000 membuat perubahan mendasar dalam SMM dengan menempatkan manajemen proses sebagai landasan pengukuran, pengamatan dan peningkatan tugas dan aktivitas organisasi, serta menuntut keterlibatan manajemen puncak dalam mengintegrasikan manajemen mutu dengan sistem bisnis secara keseluruhan, dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan peningkatan berkesinambungan. Versi selanjutnya adalah ISO 9001:2008 yang menekankan bahwa ISO 9001 mensyaratkan "*Documented quality management system*", and not a "*system of documents*" (<https://kasmancepu.wordpress.com/sejarah-iso-9001/>, diakses 20 Agustus 2016). Versi terakhir yang keluar pada tahun 2015 adalah ISO 9001:2015 yang didasarkan pada sejumlah prinsip manajemen mutu termasuk fokus yang kuat pada pelanggan, motivasi dan implikasi dari manajemen puncak, pendekatan proses dan perbaikan terus-menerus. ISO 9001:2015 membantu memastikan bahwa pelanggan mendapatkan produk-produk dan layanan berkualitas baik (http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm, diakses 20 Agustus 2016).

Salah satu perubahan penting pada revisi ISO 9001:2015 adalah membangun pendekatan sistematis untuk risiko daripada memperlakukannya sebagai komponen tunggal dari SMM. *Risk-based thinking* (berpikir berbasis risiko) sebenarnya telah dilakukan secara otomatis dan tanpa sadar untuk mendapatkan hasil terbaik. Konsep risiko selalu tersirat dalam ISO 9001, revisi tahun 2015 membuatnya lebih eksplisit dan membangun ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan (www.bsigroup.com/ISO9001Revision, diakses 20 Agustus 2016). *Risk-based thinking* (RBT) dalam ISO 9001:2015 dan contoh implementasinya untuk pengembangan sistem manajemen mutu di ITB Swadharma Jakarta. Lingkup kajian implementasi RBT dalam pengembangan sistem manajemen mutu di ITB Swadharma Jakarta dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria dalam akreditasi institusi perguruan tinggi.

B. Risk-Based Thinking (RBT) dalam ISO 9001:2015

Salah satu perubahan penting dalam ISO 9001:2015 adalah membangun pendekatan sistematis dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam semua aspek sistem manajemen mutu. Pada ISO 9001:2008, klausul pada tindakan preventif dipisahkan dari sistem secara keseluruhan, sedangkan pada ISO 9001:2015, risiko menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem menjadi proaktif daripada reaktif dalam mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan melalui identifikasi awal dan tindakan.

Dalam ISO 9001:2015 RBT perlu dipertimbangkan dari awal terhadap seluruh sistem, membuat tindakan preventif yang melekat untuk perencanaan, pengoperasian, analisis dan evaluasi kegiatan. RBT merupakan bagian dari pendekatan proses dimana tidak semua proses dari sistem manajemen mutu mewakili tingkat risiko yang sama, disesuaikan dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

ISO 9001:2015 sering memadukan istilah risiko dan peluang. Peluang atau kesempatan adalah seperangkat keadaan yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu dimana dalam menentukan untuk mengambil atau tidak mengambil kesempatan dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang berbeda. RBT akan menganalisis situasi saat ini dan kemungkinan peluang untuk perbaikan.

Risiko dalam ISO 9001:2015 dibahas sebagai bagian terpadu (terintegrasi) dari pendekatan proses. Bagian-bagian dalam ISO 9001:2015 yang membahas RBT adalah (ISO^c, 2015):

- Pendahuluan – menjelaskan konsep RBT
- Klausul 4 – mensyaratkan organisasi untuk membahas risiko dan peluang terkait proses SMM
- Klausul 5 – mensyaratkan manajemen puncak untuk meningkatkan kesadaran RBT serta menentukan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi produk/layanan yang sesuai
- Klausul 6 – mensyaratkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan kinerja SMM dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya
- Klausul 7 – mensyaratkan organisasi untuk menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan (risiko tersirat setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan)
- Klausul 8 – mensyaratkan organisasi untuk mengelola proses operasional (risiko tersirat setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan)
- Klausul 9 – mensyaratkan organisasi untuk memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang
- Klausul 10 – mensyaratkan organisasi untuk memperbaiki, mencegah atau mengurangi efek (dampak) yang tidak diinginkan dan meningkatkan SMM serta memperbarui risiko dan peluang.

Dengan mempertimbangkan risiko di seluruh sistem dan semua proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih konsisten, maka pelanggan dapat yakin bahwa mereka akan menerima produk atau layanan yang diharapkan. Penerapan RBT dalam SMM suatu organisasi akan memberikan manfaat, yaitu:

- meningkatkan tata kelola organisasi
- membangun basis pengetahuan yang kuat
- membangun budaya proaktif untuk selalu melakukan perbaikan
- mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku
- menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan
- meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

C. Prinsip dalam ISO 9001:2015, Sistem Akreditasi Nasional dan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi

Standar ISO selalu ditinjau setiap lima tahun dan direvisi jika diperlukan. Hal ini akan membantu memastikan standar ISO sebagai alat tetap berguna bagi pelanggan (pasar). Tantangan yang dihadapi oleh bisnis dan organisasi saat ini sangat berbeda dari beberapa dekade yang lalu, misalnya globalisasi telah mengubah cara berbisnis dan organisasi, operasi rantai pasokan lebih kompleks daripada yang dilakukan di masa lalu. Selain itu, terdapat peningkatan harapan dari pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya agar lebih banyak akses ke informasi, masyarakat saat ini memiliki suara yang lebih kuat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, ISO 9001 harus mencerminkan perubahan ini agar tetap relevan.

Perubahan yang paling terlihat dalam ISO 9001:2015 adalah struktur baru yang sekarang mengikuti struktur yang sama secara keseluruhan dengan standar sistem manajemen ISO lainnya, sehingga memudahkan bagi siapa saja yang menggunakan beberapa sistem manajemen. Perubahan utama lainnya adalah fokus pada *risk-based thinking* (RBT) yang sebenarnya telah menjadi bagian dari standar ISO sebelumnya, hanya saja pada versi baru RBT diungkapkan lebih eksplisit dan masuk ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan (ISO^a, 2015).

Revisi yang juga cukup signifikan dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 adalah perubahan prinsip manajemen mutu dari 8 menjadi 7 prinsip manajemen mutu (Tabel 1). Pada ISO 9001:2015, prinsip ke-4 dan ke-5 digabungkan menjadi satu prinsip yaitu "*Process Approach*", sehingga hanya ada 7 prinsip manajemen mutu.

Tabel 1 Perbedaan prinsip manajemen mutu ISO 9001:2008 dengan ISO 9001:2015

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015
1. Customer focus	1. Customer focus
2. Leadership	2. Leadership
3. Involvement of people	3. Engagement of people
4. Process approach	4. Process approach
5. Systems approach to management	5. Improvement
6. Continual improvement	6. Informed decision making
7. Factual approach to decision making	7. Relationship management
8. Mutually beneficial supplier relationship	

ISO^b (2015) menjabarkan lebih rinci prinsip-prinsip manajemen mutu dalam ISO 9001:2015. Secara ringkas, penjabaran ke-7 prinsip manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah sebagai berikut:

1. *Customer Focus*: fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan pelanggan.

2. *Leadership*: pemimpin dari semua tingkatan menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan dan menciptakan kondisi dimana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran organisasi.
3. *Engagement of People*: kompeten, mampu diberdayakan, dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan adalah hal yang penting untuk menambah kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai.
4. *Process Approach*: hasil yang dapat diprediksi dan konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktifitas-aktifitas dapat dimengerti dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh.
5. *Improvement*: organisasi yang sukses selalu fokus terhadap perbaikan.
6. *Evidence-Based Decision Making*: pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan.
7. *Relationship Management*: untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya adalah para pemasoknya.

Prinsip-prinsip dalam ISO 9001:2015 tersebut masih sejalan dengan 10 prinsip dan empat asas dalam sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi Indonesia. Adapun 10 prinsip sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi Indonesia yaitu:

1. Independen: adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem manajemen dan lembaga penjaminan mutu yang memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan penilaian, terbebas dari konflik kepentingan maupun intervensi pihak ketiga
2. Akurat: sistem manajemen dan penjaminan mutu harus dibangun berdasarkan pada data dan informasi yang akurat, sahih dan andal.
3. Obyektif: sistem manajemen dan penjaminan mutu harus didasarkan atas bukti dan informasi serta penilaian yang obyektif.
4. Transparan: sistem manajemen dan penjaminan mutu harus ditegakkan atas persyaratan, proses dan hasilnya secara terbuka,
5. Akuntabel: sistem manajemen dan penjaminan mutu harus dibangun, diterapkan dan dikembangkan sebagai akuntabilitas publik dengan penuh tanggungjawab
6. Imparsialitas: ketidakberpihakan adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem manajemen dan lembaga penjaminan mutu dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan
7. Kredibel: kredibilitas adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem manajemen dan lembaga penjaminan mutu dalam proses penilaian, pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik
8. Menyeluruh: akreditasi harus dilakukan secara komprehensif mencakup seluruh sistem manajemen maupun penjaminan mutu pendidikan tinggi.
9. Efektif: akreditasi harus dilaksanakan dengan cerminan hasil dan daya guna dalam membangun budaya mutu, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

10. Efisien: akreditasi harus dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya yang berdaya guna dan berhasilguna.

Asas sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi Indonesia adalah:

1. Jujur, Benar: kejujuran adalah landasan kebenaran, keadilan, keobyektifan, impasialitas, transparansi dan integritas
2. Keamanahan: landasan membangun akuntabilitas dan pertanggungjawaban (*accountability dan responsibility*) dan perilaku bertanggungjawab.
3. Keharmonisan: merupakan asas pengembangan sistem manajemen dan penjaminan mutu yang esensial dalam menegakkan prinsip dan nilai-nilai "partisipasi total", perilaku akuntabel internal maupun eksternal yg harmonis, keterkaitan (*interconnection, interrelatedness*), antar standar, individu, maupun perilaku organisasional secara menyeluruh.
4. Kecerdasan: landasan keseluruhan yang utama munculnya kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan mengembangkan sistem manajemen & penjaminan mutu. Kecerdasan adalah asas tumbuh kembangnya kreatifitas & kemampuan inovasi yang kredibel, komprehensif, akurat, efektif dan efisien dalam menghasilkan peningkatan mutu berkelanjutan.

Sistem manajemen mutu (SMM) pendidikan tinggi (Dikti) telah menerapkan 8 (delapan) prinsip manajemen mutu dalam sistem ISO 9001 versi lama. Pada penerapannya di Dikti ditambahkan 4 (empat) prinsip untuk keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dikti. Peningkatan kinerja Dikti didasarkan pada delapan prinsip manajemen mutu, yaitu:

1. Pendekatan proses: Organisasi pendidikan harus mengadopsi pendekatan proses ketika mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu. Organisasi harus memahami interaksi di antara proses dan mengidentifikasi sejauh mana setiap proses operasional menciptakan nilai bagi peserta didik sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Memahami kompetensi inti (fokus pada pelanggan), mencakup berbagai *enabler* (pemungkin) untuk memastikan keunggulan kompetitif dari organisasi pendidikan, yaitu teknologi, keterampilan, keahlian dan budaya organisasi. Kompetensi inti organisasi pendidikan harus didukung inovasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pendidikan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif.
3. Jumlah optimasi (pendekatan sistem untuk manajemen) memungkinkan setiap proses operasional untuk mencapai tujuannya dari sudut pandang administrasi.
4. Kepemimpinan visioner, Pemimpin dalam organisasi pendidikan harus menetapkan visi, menciptakan kebijakan untuk mewujudkan visi, dan memimpin organisasi pendidikan untuk merespon perubahan lingkungan pendidikan dengan segera.
5. Pendekatan faktual (pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan), memastikan keputusan administratif berdasarkan fakta yang jelas dan dipahami, bukan berdasarkan pada spekulasi.

Untuk tujuan ini diperlukan informasi dan kebijaksanaan yang dikombinasikan dengan analisis, berpikir logis, dan pendekatan ilmiah.

6. Kolaborasi dengan mitra (hubungan yang saling menguntungkan) adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas dosen dan peserta didik.
7. Keterlibatan orang adalah cara yang paling efektif dan efisien untuk sebuah organisasi pendidikan dalam mencapai tujuannya. Untuk itu organisasi harus dapat memfasilitasi keterlibatan semua orang dalam organisasi pendidikan, memanfaatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas setiap orang secara maksimal.
8. Perbaikan terus-menerus dari proses pembelajaran organisasi pendidikan dan pembelajaran individu dalam organisasi memungkinkan organisasi pendidikan untuk terus menciptakan nilai. Hal ini memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam lingkungan pendidikan eksternal.

Adapun empat prinsip tambahan untuk keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dikti meliputi:

1. Menciptakan nilai pembelajaran untuk mendorong peserta didik merasa puas dengan nilai yang mereka terima. Langkah-langkah kepuasan menentukan sejauh mana nilai-nilai kebutuhan dan memenuhi harapan peserta didik.
2. Fokus pada nilai sosial berarti membuat peserta didik dan pihak-pihak lain merasa tertarik, merasa nyaman, memperhatikan etika, keselamatan, dan pelestarian lingkungan. Organisasi pendidikan dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan hanya ketika masyarakat luas menghargai nilai tambah atas luaran peserta didik.
3. *Agility* (kegesitan atau kelincahan) adalah prinsip penting dalam peningkatan mutu berkelanjutan dimana lingkungan pendidikan dapat berubah secara drastis.
4. Otonomi didasarkan pada analisis keadaan dan analisis diri.

D. Sistem Manajemen Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

ISO^c (2015) menyebutkan bahwa RBT digunakan untuk membangun sistem manajemen dan proses, dimana untuk mengidentifikasi risiko suatu organisasi sangat tergantung pada konteks organisasi. Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, lingkup kajian ini dibatasi pada implementasi RBT dalam pengembangan sistem manajemen mutu di ITBS Swadharma berdasarkan kriteria-kriteria dalam akreditasi institusi perguruan tinggi.

Mutu dan kelayakan suatu perguruan tinggi di Indonesia dapat ditetapkan berdasarkan standar akreditasi yang menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi. Standar akreditasi institusi perguruan tinggi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/indikator

kunci) sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), terdapat 9 kriteria akreditasi institusi perguruan tinggi, yaitu:

- C.1 Visi, misi, tujuan dan strategi
- C.2. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
- C.3. Mahasiswa
- C.4. Sumber daya manusia
- C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- C.6 Pendidikan
- C.7 Penelitian
- C.8 Pengabdian kepada masyarakat
- C.9 Luaran dan Capaian Tridharma

BAB II TABEL MITIGASI

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA						
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Kondisi Eksternal (Environmental Setting)	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Perguruan tinggi mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi belum menetapkan analisis mengenai: 1) kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2) posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi harus menetapkan analisis mengenai: 1) kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2) posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi harus: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Rector dan semua Wakil Rector

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA						
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
5 Profil Institusi	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi profil institusi menunjukkan keserbacakupan informasi yang disampaikan secara ringkas dan jelas, serta konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	belum dapat menunjukkan deskripsi profil institusi yang memenuhi keserbacakupan informasi yang disampaikan secara ringkas dan jelas, serta konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	perguruan tinggi mendeskripsikan profil institusi	membuat profil institusi yang memuat informasi yang serba cukup dan disampaikan secara ringkas.	rektor dan wakil

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA						
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
C. Kriteria						
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran						
4. Indikator Kinerja Utama						
	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	penetapan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian (VMTS) antara lain:	1. Membuat vmts yang mudah diukur dan diterjemahkan ke dalam indikator kinerja kunci (ikk) serta 2. Membuat vmts yang sederhana dan mudah dipahami, dan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder terkait.	1.1. Latar Belakang, Tujuan, rasional VTMS memerlukan a. Statuta b. Oransi dan Ortaker c. Kebijakan-kebijakan Pemerintah d. Kebijakan Kemenag 2. Mekanisme penetapan VMTS: a. SK Panitia VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal b. TOR Kegiatan VTMS c. Daftar Hadir Rapat VTMS d. Notulensi Rapat VTMS e. SK Penetapan VTMS f. SK Perubahan VTMS	Kepala Biro, WRT dan WDT
			0 VMTS sulit diukur atau terlalu abstrak untuk mencapainya, sehingga sulit diterjemahkan menjadi indikator-indikator yang terukur			
		0 VMTS gagal dipahami oleh stakeholder, karena minimnya sosialisasi atau memang bahasanya yang sulit dipahami, sehingga arah jalannya organisasi menjadi tidak jelas.	3. Mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (vmts), harus mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi		1. Kebijakan rektor tentang penyusunan VMTS 2. Pedoman Penyusunan VTMS mencakup: a. Penyusunan VMTS b. Evaluasi VMTS c. Sosialisasi VMTS d. Implementasi VMTS ke dalam peraturan dan program Pengembangan 3. SK Rektor Tim Penyusunan VMTS 4. SK Rektor Tentang Evaluasi VMTS 5. SK Rektor tentang Sosialisasi VMTS 6. SK Rektor tentang VMTS menjadi acuan peraturan dan program pengembangan ITB Raden Fatah 7. Laporan/Bukti kegiatan evaluasi VMTS (survei VMTS) 8. Laporan/Bukti Kegiatan Sosialisasi VMTS 9. Laporan/Bukti bahwa VMTS menjadi landasan peraturan dan program pengembangan 10. mekanisme kontrol pencapaian VMTS	Kepala Biro, WRT dan WDT
		0 Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.	4. Mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (vmts), harus mencakup pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan			
		0 Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan	5. Strategi pencapaian vmts perguruan tinggi serta sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya harus dijalankan secara komprehensif.		1. RIP mencakup: a. SK Rektor Tim Penetapan RIP b. Notulensi Rapat RIP c. SK Rektor Penetapan RIP 2. RENSTRA, mencakup: a. SK Rektor Tim Penyusunan Renstra b. TOR Penyusunan Renstra c. Notulensi Penyusunan Renstra d. SK Rektor Penetapan Renstra 3. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi yang mengacu kepada VTMS setiap tahun	
		0 Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup kebutuhan pengembangan perguruan tinggi				
		0 Belum ada penjelasan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS perguruan tinggi serta sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya				
		0 Belum ditetapkan indikator kinerja tambahan	6. Indikator kinerja tambahan harus ditetapkan			

0. Belum ada deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan.	7. Membuat deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian vmts yang telah ditetapkan.	Laporan Monev VMTS Mencakup: 1. SK Tim Monev VMTS 2. Laporan Monev VMTS mencakup: a. Monev VMTS 2016 b. Monev VMTS 2017 c. Monev VMTS 2018 d. Monev VMTS 2019	LPM
0. Belum ditetapkan/nya instrument pengukur dan metode yang tepat atas Capaian kinerja, dan hasilnya belum dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS.	8. Perlu menetapkan instrument pengukuran dan metode yang tepat atas capaian kinerja, dan hasilnya belum dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian vmts.	1. Renstra 2. Buku pedoman monev VMTS	WR 1, WD1, LPM
0. Belum ada gambaran Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi.	9. Membuat deskripsi ketercapaian vmts dan tindak lanjut/berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Ketercapaian VMTS mencakup: 1. Laporan RTM Tahun 2016 dan tindak lanjutnya 2. Laporan RTM Tahun 2017 dan tindak lanjutnya 3. Laporan RTM Tahun 2018 dan tindak lanjutnya 4. Laporan RTM Tahun 2019 dan tindak lanjutnya	LPM

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA						
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
2 Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama						
4 Indikator Kinerja Utama						
a) Sistem Tata Pamong						
1)	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong untuk menyusun arah strategi sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabakan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	1. Tidak tersedia dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategi sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi.	1. Menetapkan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang mencakup, sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.	mengidentifikasi dan menyusun dokumen rektor dan wakil rektor II tata pamong yang dibutuhkan pada kriteria ini.	
2)	Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	2. Tidak dapat mendeskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.	2. Menetapkan dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.	mengidentifikasi dan menyusun dokumen rektor dan wakil rektor II tata pamong yang dibutuhkan pada kriteria ini.	
3)	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	3. Tidak dapat menunjukkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.	3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait tata pamong (pemerintahan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tatakelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama juga tidak dapat diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	mengidentifikasi dan menyusun dokumen rektor dan wakil rektor II tata pamong yang dibutuhkan pada kriteria ini.	
4)	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG (yang paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.	4. Belum ada bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.	4. Menetapkan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategi sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi.	mengidentifikasi dan menyusun dokumen rektor dan wakil rektor I, II, III, kabiro perwujudan GUG lima pilar yang dibutuhkan pada kriteria ini.	
5)	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penejakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	5. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait tata pamong (pemerintahan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tatakelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama juga tidak dapat diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	5. Menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.	mengidentifikasi dan menyusun penetapan standar tata pamong yang dibutuhkan pada kriteria ini.	rektor dan wakil rektor I, II, III, kabiro

b) Kepemimpinan		5			1. Perpres Transformasi IAIN menjadi ITB 2. Statuta 3. Ortafa dan Ortaker 4. Kebijakan-kebijakan Pemerintah 5. Kebijakan Kemendag 6. Mitigasi resiko 7. Kebijakan GUG 8. Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola mencakup: a. SK Dewan etik dosen dan tendik b. Pedoman kerja dewan etik mencakup 1) Kode etik Pembelajaran 2) Kode etik Penelitian dan Karya Ilmiah 3) Kode etik Pkm 4) Kode Etik Dosen 5) Kode etik tendik 6) Kode etik pegawai BLU 7) Kode etik mahasiswa 8) Kode etik kerjasama		
1)	Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	0	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi belum memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi wajib memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	perguruan tinggi mempersiapkan anjab	Rektor dan wakil rektor II
2)	Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.		Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	8. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Organisasional.	30. Belum ada deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP	Rektor dan LPM
3)	Ketersediaan bukti kajian ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.		Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	9. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Publik.		Rektor dan humas
c) Pengelolaan							
1)	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).		Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.	10. Tidak tersedia bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	10. Menunjukkan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	mengidentifikasi dan mengkategorikan bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional	Rektor dan seluruh bagian
2)	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PAM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Informasi, j) Sistem Penjaminan Mutu, dan k) Kerjasama.		Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	Perguruan tinggi belum memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	menunjukkan bukti formal kesesuaian +11 aspek (lihat di Kriteria ban PFI)		
3)	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PAM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.		Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.	12. tidak tersedia bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) pkm, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama, k) sistem informasi.	12. Mengumpulkan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) pkm, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama, k) sistem informasi.	mendefinisikan dan menyusun dokumen 11 aspek	Rektor dan wakil rektor
						37. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)	Rektor bersama humas

	4)	Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis (yang mencakup: 1) keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMSTs Institut, 4) analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan).	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penempatannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	13. belum menetapkan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit	menetapkan RENSTRA	menetapkan RENSTRA dan mekanisme persetujuannya, ada benchmark perguruan tinggi sejenis tingkat internasional	Rektor dan wakil rektor	
d)	Sistem Penjaminan Mutu							
	1)	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis risiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	belum tersedia dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	16. Menetapkan dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.	15. Menunjukkan terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang paling tidak termasuk dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi	Rektor dan semua bagian	
	2)	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	21. Belum tersedia bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	17. Menetapkan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang	21. mengidentifikasi bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	LPM	
LKPT	Sertifikasi/audit eksternal (Tabel 1.a LKPT)		8	A. Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi: 1) Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. 2) Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi. 3) Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi.	a) perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi belum memenuhi syarat	18. Mengumpulkan bukti yang sah terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (pppp).	mengidentifikasi hasil rekognisi internasional	LPM
				B. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi >= 5%: 1) Jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi. 2) Jumlah program studi pada program utama.	b) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi belum mencapai 5 %	19. Belum mampu menunjukkan bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.	mengidentifikasi hasil rekognisi internasional	LPM
LKPT	Audit eksternal keuangan (Tabel 1.a LKPT)		9	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi. (PTA-SATKER) Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjut. (PTN-SLU) Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualan (Unqualified Opinion). (PTS) Audit eksternal dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik.	c) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi belum dilakukan oleh kantor akuntan publik	20. Menunjukkan bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi mutu serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan	meminta pelaksanaan audit eksternal oleh kantor akuntan publik	Rektor dan Kabiro
LKPT	Akreditasi program studi (Tabel 1.b LKPT)		10	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 1) Jumlah program studi terakreditasi Unggul. 2) Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. 3) Jumlah program studi terakreditasi Baik. 4) Jumlah program studi terakreditasi A. 5) Jumlah program studi terakreditasi B. 6) Jumlah program studi terakreditasi C. 7) Jumlah program studi terakreditasi minimum (program studi baru). 8) Jumlah program studi tidak terakreditasi/kadaluarsa.	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) masih banyak yang C	21. Menunjukkan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.	mengidentifikasi status akreditasi universitas dan prodi	LPM

e)	Kerjasama	11			23. Menetapkan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepusan mitra kerjasama		
1)	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepusan mitra kerjasama.		Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepusan mitra kerjasama.	23. Belum dapat menunjukkan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepusan mitra kerjasama	24. Menetapkan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	mengidentifikasi dan menyusun dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepusan mitra kerjasama.	Rektor, WR III, Kabiro dan bagian kerja sama
2)	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.		Perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.	27. Belum dapat menunjukkan bukti sah kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.	menunjukkan bukti sah kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.	mengidentifikasi kerjasama meliputi tridharma dan menganalisis manfaat kerja sama bagi kedua belah pihak	Rektor, WR III, Kabiro dan bagian kerja sama
3)	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.		Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	25. Belum dapat menunjukkan Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.	26. Melakukan dan menunjukkan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepusan kepusan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	mengidentifikasi Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.	Rektor dan bagian Kerja sama
4)	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepusan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.		Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepusan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	26. Belum dapat menunjukkan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepusan kepusan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	27. Melakukan dan menunjukkan bukti sah kerjasama tridharmayang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.	melakukan money dan menunjukkan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepusan kepusan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	Rektor dan bagian kerja sama
LKPT	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PKM (Tabel 1.c LKPT)	12	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir: 1) Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional. 2) Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional. 3) Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal. 4) Jumlah dosen tetap.	25. Melakukan rekapitulasi Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.	Melakukan rekapitulasi Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.	Rektor dan bagian kerja sama
5	Indikator Kinerja Tambahan	13	Penetapan SMART (manipulator kerja tambahan) yang ditetapkan dan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang meliputi SN-OKRT dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	PT belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	rekter dan semua bagian
6	Evaluasi Capaian Kinerja	14					

	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	29. Belum dapat menunjukkan i deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi	34. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan (sehubungan dengan 31)	mengidentifikasi dan melakukan analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Rektor dan wakil rektor
7. Perencanaan Mutu	15. Dieksekusi pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya diindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan mutu	13. Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	14. Belum tersedia dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	melaksanakan sistem penjaminan mutu Rektor dan LPM yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal seperti ISO	
8. Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	16. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan ter sistem.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	35. Belum ada survey kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan ter sistem (sehubungan dengan 31)36. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)37. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	35. melaksanakan survey kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan ter sistem (sehubungan dengan 31)36. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)37. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)	rektor dan semua bagian

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA							
ELEMEN	INDIKATOR		SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
3	Mahasiswa						
4	Indikator Kinerja Utama						
a)	Kualitas Input Mahasiswa						
LKPT	Rasio pendafar terhadap pendafar lulus seleksi (Tabel 2.a LKPT)	17	Rasio jumlah pendafar terhadap jumlah pendafar yang lulus seleksi pada program utama. (PT >= 5, PTS >=3) 1) Jumlah calon mahasiswa yang ikut sekeksi pada program utama. 2) Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama.	4. Tidak mampu menunjukkan Kualitas input mahasiswa serta Hasil analisis data yang meliputi :	4. Menetapkan Kualitas input mahasiswa serta Hasil analisis data yang meliputi :	membentuk tim penetapan standar PT terkait sistem layanan dan sistem seleksi	Rektor, WR III
			Persentase jumlah mahasiswa yang mendafar ulang terhadap jumlah pendafar yang lulus seleksi pada program utama. (PTN.PTS >=95%) 1) Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. 2) Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama.	0 Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendafar terhadap jumlah pendafar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendafar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendafar ulang	0 Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendafar terhadap jumlah pendafar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendafar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendafar ulang	membentuk tim penetapan standar PT terkait sistem layanan dan sistem seleksi	Rektor, WR III
LKPT	Persentase pendafar ulang terhadap pendafar lulus seleksi (Tabel 2.a LKPT)	18	Persentase jumlah mahasiswa yang mendafar ulang terhadap jumlah pendafar yang lulus seleksi pada program utama. (PTN.PTS >=95%)				Rektor, WR III
LKPT	Mahasiswa asing (Tabel 2.b LKPT)	19	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa (0,5%) 1) Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.	0 Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	0 Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	membentuk tim penetapan standar PT terkait sistem layanan dan sistem seleksi	Rektor, WR III
b)	Layanan Kemahasiswaan	20	Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	5. Belum mampu melaksanakan semua Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:	5. Menetapkan layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:	membentuk tim penetapan standar PT terkait sistem layanan dan sistem seleksi	Rektor, WR III
	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan yang mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan.			1) penalaran, termasuk softskills, 2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM, 3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling,	1) Penalaran, termasuk softskills, 2) Minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan ukm, 3) Kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling,	membentuk tim penetapan standar PT terkait sistem layanan dan sistem seleksi membentuk tim penetapan standar PT terkait sistem layanan dan sistem seleksi membentuk tim penetapan standar PT terkait sistem layanan dan sistem seleksi	Rektor, WR III Rektor, WR III Rektor, WR III
			beasiswa, layanan kesehatan, serta beasiswa, layanan kesehatan, serta			seleksi	
			4) karir dan bimbingan kewirausahaan.	4) Karir dan bimbingan kewirausahaan.		membentuk tim penetapan standar PT terkait sistem layanan dan sistem seleksi	

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA						
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
4 Sumber Daya Manusia						
4 Indikator Kinerja Utama						
a) Profil Dosen						
LKPT	Kecukupan dosen perguruan tinggi (Tabel 3.a.1) LKPT)	21 Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. Keterangan: Data dosen tetap tercantum dalam laman PD-DIKTI. Jika terdapat program studi yang tidak memenuhi syarat jumlah dosen minimum (jumlah dosen kurang dari 6), maka perguruan tinggi tidak terakreditasi. (>=12) 1) Jumlah dosen tetap. 2) Jumlah program studi.	1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).	1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).	menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: a) Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan). b) Pengelolaan SDM mencakup: 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pembehentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PKM. 2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pembehentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan. 3) Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll. 4) Menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait SDM yang berisi: bagaimana menetapkan standar SDM (pendidik, peneliti, dan pelaksana pkn). Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk	Rektor, WR II, Bag Kepegawaian
LKPT	Jabatan akademik dosen (Tabel 3.a.2) LKPT)	22 Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (>=15% GB) 1) Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. 2) Jumlah dosen tetap.	belum memenuhi rasio 15 % jumlah GB dari jumlah dosen tetap	2. Menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup:		
LKPT	Sertifikasi dosen (Tabel 3.a.3) LKPT)	23 Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional (sertifikat profesi) terhadap jumlah seluruh dosen tetap (>=80%) 1) Jumlah dosen tetap bersertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. 2) Jumlah dosen tetap.	belum memenuhi rasio lebih dari 80% dosen tetap bersertifikat pendidik dari jumlah dosen tetap	a. Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan). 5) Menetapkan Profil Dosen dan melakukan analisis data tentang: a) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi b) Jabatan Akademik Dosen c) Dosen Tidak Tetap d) Beban Kerja Dosen		
LKPT	Dosen tidak tetap (Tabel 3.a.4) LKPT)	24 Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) (<=10%).	dosen tetap dan dosen tidak tetap berbanding 10%			Rektor, WR II, Bag Kepegawaian
LKPT	Beban kerja dosen (Tabel 3.b, 3.c.1), 3.c.2 LKPT)	25 Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. (antara 20 - 30%) 1) Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. 2) Jumlah dosen tetap.	belum memenuhi rasio jumlah mahasiswa dan dosen 30 %	5) Menetapkan Profil Dosen dan melakukan analisis data tentang: a) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi b) Jabatan Akademik Dosen c) Dosen Tidak Tetap d) Beban Kerja Dosen	melakukan analisis rasio mahasiswa dan dosen	Rektor, WR II, Bag Kepegawaian
b) Kinerja Dosen						
LKPT	Produktivitas penelitian (Tabel 3.c.1) LKPT)	26 Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. (<= 0,1/dn) 2) Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. (>= 1/dn) 3) Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. (>= 2/dn) 4) Jumlah dosen tetap.	belum rasional Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. (>= 0,1/dn) 2) Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. (>= 1/dn) 3) Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. (<= 2/dn) 4) Jumlah dosen tetap.	melakukan analisis data tentang 1) Produktivitas Penelitian dan PKM	melakukan analisis data tentang 1) Produktivitas Penelitian dan PKM	Rektor, WR II, Bag Kepegawaian

LKPT	Produktivitas PKM (Tabel 3.1 & 3.2) (LKPT)	29 Rata-rata PKM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir: 1) Jumlah PKM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir ($\geq 0.05/dsn$). 2) Jumlah PKM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir ($\geq 0.5/dsn$). 3) Jumlah PKM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir ($\geq 1/dsn$). 4) Jumlah dosen tetap.	Belum sesuai Rata-rata PKM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah PKM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir ($\geq 0.05/dsn$). 2) Jumlah PKM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir ($\geq 0.5/dsn$). 3) Jumlah PKM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir ($\geq 1/dsn$). 4) Jumlah dosen tetap.	melakukan analisis data tentang 1) Produktivitas Penelitian dan PKM	melakukan analisis data tentang 1) Produktivitas Penelitian dan PKM	Rektor, WR II, Bag. Kepegawaian
LKPT	Pengakuan dosen (Tabel 3.3 & 3.4) (LKPT)	25 Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. (2) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. 1) Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ($\geq 0.5/dsn$). 2) Jumlah dosen tetap.	Belum sesuai Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. (2) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. 1) Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ($\geq 0.5/dsn$). 2) Jumlah dosen tetap.	1) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional, Profesi, Industri/ Kompetensi)		Rektor, WR II, Bag. Kepegawaian
d)	Tenaga kependidikan	29 Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pusat kawam, laboran, teknis, dll.) untuk mendukung pelaksanaan triadharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	Belum dapat menunjukkan Analisis data tentang Tenaga Kependidikan	Analisis data tentang Tenaga Kependidikan Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pusat kawam, laboran, teknis, dll.). Indikator Kecukupan: 1) TT, tenaga kependidikan, jumlah, dukungan teknologi informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan), dan kompetensi tenaga kependidikan.	melakukan Analisis data tentang Tenaga Kependidikan Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pusat kawam, laboran, teknis, dll.). Indikator Kecukupan: 1) TT, tenaga kependidikan, jumlah, dukungan teknologi informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan), dan kompetensi tenaga kependidikan.	Rektor, WR II, Bag. Kepegawaian
	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pusat kawam, laboran, teknis, dll.)					

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA						
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
5 Keuangan, Sarana dan Prasarana						
4 Indikator Kinerja Utama						
a) Keuangan						
LKPT	Perolehan dana dari mahasiswa (Tabel 4.a LKPT).	30. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTN SATKER <= 50%, BLU <= 40%, BH <= 30%, PTS <= 75%). 1) Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTN BLU <= 40%, belum memenuhi). 1) Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	5. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait: a) keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber standar terkait: a) keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban, dan b) sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.	5. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait: a) keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban. Juga melakukan analisis terhadap jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam tiga tahun	Rektor dan WR II
LKPT	Perolehan dana dari selain mahasiswa (Tabel 4.a LKPT).	31. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa embaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTN >= 10%). Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana iktisat dan filantropis, dll.). 1) Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTN >= 10%). Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana iktisat dan filantropis, dll.). 1) Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	5. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait: a) keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban, dan b) sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.	5. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait: a) keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban. Juga melakukan analisis terhadap jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam tiga tahun	Rektor dan WR II
LKPT	Dana operasional pembelajaran (Tabel 4.b LKPT).	32. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun (>= 20%). 1) Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). 2) Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.	3. Belum ada Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.	7. Pada bagian Keuangan, sebaiknya segera membuat analisis kecukupan, proposi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	mengidentifikasi kecukupan, proposi, keberlanjutan, perolehan dan penggunaan data	
LKPT	Dana penelitian (Tabel 4.b LKPT).	33. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (>= 20%). 1) Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). 2) Jumlah dosen tetap.	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (>= 20%). 1) Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). 2) Jumlah dosen tetap.	6. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta analisis mekanisme kontrol pencapaiannya.	Pada bagian Sarana dan prasarana : belum ada standar yang telah ditetapkan serta analisis mekanisme kontrol pencapaiannya.	
LKPT	Dana PKM (Tabel 4.b LKPT).	34. Rata-rata dana PKM dosen/ tahun (>= 5%). 1) Jumlah dana PKM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). 2) Jumlah dosen tetap.	Rata-rata dana PKM dosen/ tahun (>= 5%). 1) Jumlah dana PKM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). 2) Jumlah dosen tetap.	7. Pada bagian Keuangan, melakukan Analisis kecukupan, proposi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	1) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana	Rektor dan WR II
LKPT	Dana penelitian institusi (Tabel 4.b LKPT).	35. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi (>= 5%). 1) Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi (>= 5%). 1) Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	7. Pada bagian Keuangan, melakukan Analisis kecukupan, proposi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	1) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana	Rektor dan WR II

LKPT	Dana PKM institusi (Tabel 4.6 LKPT).	36	Persentase penggunaan dana PKM terhadap total dana perguruan tinggi ($\geq 1\%$). 1) Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PKM dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase penggunaan dana PKM terhadap total dana perguruan tinggi ($\geq 1\%$). 1) Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PKM dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	7. Pada bagian Keuangan, melakukan Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	1) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana	Rektor dan WR II
b)	Sarana dan Prasarana 1) Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PKM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus.	37	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PKM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI.	Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiapan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PKM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang dibutuhkan khusus. Hal ini belum dimiliki oleh ITB	Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiapan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PKM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang dibutuhkan khusus.	mengidentifikasi dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiapan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PKM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang dibutuhkan khusus.	Rektor dan Kabi
	2) Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).		Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi.	Perguruan tinggi belum memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi.	Perguruan tinggi mengupayakan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi.	mengidentifikasi sistem administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi.	Rektor dan PUSTIPD
3)	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PKM, Sistem Informasi Perpustakaan, di.).		Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, di.). 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi.	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, di.). 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi			

s
e
c
a
r
a
b
e
r
k
a
l
a
y
a
n
g
h
a
s
i
l
n
y
a
d
i
l
i
n
d
a
k
l
a
n
j
u
t
i
u
n
t
u
k
p
e
n
y
e
m
p
u
r
n
a
a
n
s
i
s
t
e
m
i
n
f
o
r
m
a
s
i
.

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA					
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN
6 Pendidikan					
4 Indikator Kinerja Utama					
a) Kurikulum					
1)	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	4. Belum tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan	4. Menyediakan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan	1. Membuat deskripsi yang jelas mengenai latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saling perguruan tinggi.
2)	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKN, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	5. Belum tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKN dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum	menyediakan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKN dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum	2. Menetapkan dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.
3)	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan penilaian kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	6. Belum tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	menetapkan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran), suasana akademik, integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4)	Sistem pembelajaran				5. Menyediakan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:

Rektor dan WR I

Rektor dan WR I

Rektor dan WR I

Rektor dan WR I

Rektor dan WR I

1)	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	7. Belum tersedia bukti-bukti Pembelajaran: 1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran. 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	menyediakan bukti-bukti Pembelajaran: 1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran. 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. b) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum	Rektor dan WR I
2)	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	7. Belum tersedia bukti-bukti Pembelajaran: 1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi menyediakan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	melakukan identifikasi dan membuat pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Rektor dan WR I
3)	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan diindak lanjut secara berkelanjutan.	belum tersedia bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	menyediakan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	melakukan movev	Rektor dan WR I
LKPT	Pembelajaran praktikum/praktik/PKL (Tabel Z.c LKPT).	Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah (antara 50 % - 70%). 1) Jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan selama masa program. 2) Jumlah kredit seluruh mata kuliah.				Rektor dan WR I
c)	Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	8. Belum ada penetapan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran berupa: 1) dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 2) bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	8. menetapkan pedoman Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran a. dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran b. bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	8. menetapkan pedoman Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran a. dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran b. bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Rektor dan WR I Raktor dan WR I
1)	Ketersediaan dokumen legal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi belum memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	membuat pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Rektor dan WR I
2)	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	BELUM Ktersedia bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran sebagai bukti pelaksanaan SPMI	Rektor dan WR I
3)	Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.					
d)	Susunan Akademik					

1)	Ketersediaan dokumen legal kebijakan suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	9. Belum tersedia informasi mengenai Suasana akademik baik dalam bentuk: 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 2) Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PKM baik pada skala lokal/nasional/ internasional, b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.	membuat dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. menyediakan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PKM baik pada skala lokal/nasional/ internasional,b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	Rektor dan WR I
2)	Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PKM baik pada skala lokal/nasional/ internasional, b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti beresesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	11. Belum ada analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa hasil survey setiap tahun yang ditindaklanjuti beresesuaian dengan renstra pengembangan suasana akademik	melakukan survey tentang suasana Rektor dan WR I akademik	
3)	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	belum mampu menyediakan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	melakukan analisis perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara konsisten	Rektor dan WR I

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA						
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Penelitian					
4	Indikator Kinerja Utama					
a)	Penelitian					
1)	Ketersediaan dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, garis besar RIP (peta jalan), sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional dan internasional.	a) belum dapat menunjukkan Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.	a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.	menyediakan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.	WR I dan LPPM
2)	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh para pemangku kepentingan.	b) belum dapat menunjukkan Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya, mudah diakses, sesuai dengan rencana penelitian, dipahami oleh para pemangku kepentingan	b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya, mudah diakses, sesuai dengan rencana penelitian, dipahami oleh para pemangku kepentingan	menyediakan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya, mudah diakses, sesuai dengan rencana penelitian, dipahami oleh para pemangku kepentingan	WR I dan LPPM
3)	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup: laporan dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penggunaan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 & 4, 5) secara berkala dan tindak lanjut.	c) Belum dapat menunjukkan Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penggunaan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penggunaan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	c) penggunaan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	WR I dan LPPM
4)	Dokumentasi pelaksanaan proses penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana belum memenuhi 5 aspek yaitu 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana belum memenuhi 5 aspek yaitu 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	d) menyediakan Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek yaitu 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	WR I dan LPPM
5)	Kelompok Riset					
1)	Melakukan penelitian dan pengembangan	Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	e) belum dapat menunjukkan Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	menyediakan bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	WR I dan LPPM

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA

ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
8	Pengabdian kepada Masyarakat					
4	Indikator Kinerja Utama					
a)	Pelaksanaan PKM					
1)	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing internasional.	belum tersedia dokumen formal Renstra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PKM.	a) Ketersediaan dokumen formal Renstra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PKM.	1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.	WR I dan LPPM
2)	Ketersediaan pedoman PKM dan bukti sosialisasinya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman PKM yang di sosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PKM, serta dipahami oleh penangku kepentingan.	belum tersedia pedoman PKM dan bukti sosialisasinya.	b) Ketersediaan pedoman PKM dan bukti sosialisasinya.	2. Belum mampu mendeskripsikan dokumen formal kebijakan dan pedoman PKM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM.	WR I dan LPPM
3)	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PKM, 4) legalitas penugasan pelaksana PKM/kerjasama PKM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PKM.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PKM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	belum ada bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PKM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PKM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PKM.	c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PKM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PKM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PKM.	3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait PKM di perguruan tinggi yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	WR I dan LPPM
4)	Dokumentasi pelaporan PKM oleh pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PKM dari pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.	belum terdokumentasi pelaporan PKM oleh pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek	Dokumentasi pelaporan PKM oleh pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana	4. Tidak menetapkan Indikator Kinerja Utama seperti	WR I dan LPPM
b)	Kelompok Keberadaan kelompok pelaksana PKM	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PKM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM, 2) dihasilkan produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkan produk PKM yang berdaya saing nasional.	Perguruan tinggi belum memiliki kelompok pelaksana PKM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM, 2) dihasilkan produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkan produk PKM yang berdaya saing nasional.	Perguruan tinggi belum memiliki kelompok pelaksana PKM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM, 2) dihasilkan produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkan produk PKM yang berdaya saing nasional.		WR I dan LPPM

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA						
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
9 Luaran dan Capaian Tridharma						
1 Indikator Kinerja Utama						
a) Pendidikan						
LKPT	Indeks Prestasi Mahasiswa (Tabel 5.a.1) LKPT)	46 Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. Perhitungan Skor untuk program Diploma (≥ 3.25) Perhitungan Skor untuk program Profesi, Magister dan Doktor (≥ 3.5)	Belum mampu menunjukkan Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sahih dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.	1) Capaian pembelajaran yang diukur 1. melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan	Tridharma	BAK
LKPT	Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri (Tabel 5.a.2) LKPT)	47 Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir ($\geq 30\%$) 1) Jumlah lulusan yang memiliki sertikat kompetensi, profesi, dan/atau industri dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir.		a) Pendidikan	a) Pendidikan	BAK
LKPT	Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5.b.1) LKPT)	47 Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). 1) Jumlah prestasi akademik internasional (0,005%). 2) Jumlah prestasi akademik nasional (1%). 3) Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal (5%). 4) Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.	2) Prestasi akademik mahasiswa	Melakukan deskripsi atas Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sahih dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.		WR III
LKPT	Prestasi non-akademik mahasiswa (Tabel 5.b.2) LKPT)	48 Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). 1) Jumlah prestasi non-akademik internasional (0,1%). 2) Jumlah prestasi non-akademik nasional (2%). 3) Jumlah prestasi non-akademik wilayah/lokal (10%). 4) Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.	prestasi non-akademik mahasiswa	1) Capaian pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan		WR III
LKPT	Lama Studi Mahasiswa (Tabel 5.c.1) LKPT)	49 Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir. Perhitungan Skor untuk program Sarjana ($3.5 \leq MS \leq 4.5$) Perhitungan Skor untuk program Diploma Tiga ($3 \leq MS \leq 3.5$)		1) Prestasi akademik mahasiswa dan prestasi non-akademik mahasiswa		BAK
LKPT	Kelulusan Tepat Waktu (Tabel 5.c.2)a - h LKPT)	50 Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program ($\geq 50\%$).	3) Efektivitas dan produktivitas pendidikan	2) Efektivitas dan produktivitas pendidikan		
LKPT	Keberhasilan Studi (Tabel 5.c.2)a - h LKPT)	51 Persentase keberhasilan studi untuk setiap program ($\geq 85\%$).	4) Daya saing lulusan Kinerja lulusan	3) Daya saing lulusan Kinerja lulusan		
LKPT	Waktu tunggu lulusan (Tabel 5.d.1) LKPT)	52 Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama (≤ 6 bulan). Keterangan persentase responden lulusan: 1) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Pmin = 10%. 2) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Pmin = 20% - ((10% / 5000) x jumlah lulusan).	b) Pada bagian Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat belum mampu menunjukkan data yang berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sahih, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif	b) melakukan analisis data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sahih, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif		BAK

LKPT	Kesesuaian bidang kerja lulusan (Tabel 5.d.2) LKPT).	63	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi. Keterangan persentase responden lulusan: 1) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Pmin = 10%. 2) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Populasi minimal = 20% - (10% / 5000) x jumlah lulusan.	1) Publikasi ilmiah	1) Publikasi ilmiah	Rektor
LKPT	Kepuasan pengguna lulusan (Tabel 5.e.1) LKPT).	64	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1. Etika 2. Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama). 3. Kemampuan berbahasa asing. 4. Penggunaan teknologi informasi. 5. Kemampuan berkomunikasi. 6. Kerjasama tim. 7. Penyeimbangan diri. Keterangan persentase responden lulusan: 1) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Pmin = 10%. 2) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Populasi minimal = 20% - (10% / 5000) x jumlah lulusan.	2) Sitasi Karya Ilmiah. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.	2) Sitasi Karya Ilmiah. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.	Rektor
LKPT	Tempat kerja lulusan (Tabel 5.e.2) LKPT).	65	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan: 1) Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional (5%). 2) Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin (20%). 3) Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin (80%). Keterangan persentase responden lulusan: 1) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Pmin = 10%. 2) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Populasi minimal = 20% - (10% / 5000) x jumlah lulusan.	2. Belum menetapkan indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan	2. Menetapkan indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus	
b) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.		
LKPT	Publikasi di jurnal ilmiah (Tabel 5.f LKPT).	66	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir: 1) Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi. 2) Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. 3) Jumlah publikasi di jurnal internasional. 4) Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. 5) Jumlah dosen tetap.	3. Belum dapat melaporkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor	3. Melaporkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	
LKPT	Publikasi pada seminar/media massa (Tabel 5.f LKPT).	67	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir: 1) Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi. 2) Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional. 3) Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional. 4) Jumlah tulisan di media massa nasional. 5) Jumlah tulisan di media massa internasional. 6) Jumlah dosen tetap.	4. Belum dapat menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah	4. Menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu	LPPM
PTN	LKPT	68	Sitasi karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir: 1) jumlah artikel yang disitasi. 2) Jumlah dosen tetap.	5. Belum melakukan survey Kepuasan Pengguna	6. Melakukan survey Kepuasan Pengguna	LPPM

Bagian ini berisi: Bagian ini berisi: LPPM

LKPT	Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat (Tabel 5.g LKPT).	PY	Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. 2) Jumlah program studi.
LKPT	Luaran Penelitian dan PKM (Tabel 5.h LKPT).	SB	Jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. 1) Jumlah luaran penelitian/PKM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Paten Sederhana) 2) Jumlah luaran penelitian/PKM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3) Jumlah luaran penelitian/PKM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4) Jumlah luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. 5) Jumlah dosen tetap.

b) sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran

pengukuran tinggi (pengguna lulusan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

c) bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

1. Menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.

a) sistem untuk mengukur kepuasan

pengguna luaran (pengguna lulusan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

b) bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

6. Belum dapat menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.

LPPM

LPPM

LPPM

INSTRUMEN APT 3.0 - KRITERIA DAN BUTIRNYA						
ELEMEN	INDIKATOR	SASARAN	RISIKO	PELUANG	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan						
1 Analisis dan Capaian Kinerja	Keselebacupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	60	Perguruan tinggi telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.	Perguruan tinggi belum melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh	tersedianya analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh	Perguruan tinggi melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh
			2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi.	perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi	standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh	standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh
			4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.
2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	61	Perguruan tinggi melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat.	Perguruan tinggi belum melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat.	tersedianya analisis SWOT atau analisis lain yang relevan,	Perguruan tinggi melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat.
			2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,	kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,	1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,
3 Program Pengembangan	Ketepatan didalam menetapkan prioritas program pengembangan.	62	Perguruan tinggi menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	Perguruan tinggi belum menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	tersedianya prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	Perguruan tinggi menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.

4 Keberlanjutan Program		85	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.	tersedanya kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.	Perguruan tinggi menyediakan kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.

BAB III

PENUTUP

Salah satu perubahan penting dalam ISO 9001:2015 adalah membangun pendekatan sistematis dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam semua aspek sistem manajemen mutu. Revisi yang juga cukup signifikan dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 adalah perubahan prinsip manajemen mutu dari 8 menjadi 7 prinsip manajemen mutu. Prinsip-prinsip dalam ISO 9001:2015 tersebut masih sejalan dengan 10 prinsip dan empat asas dalam sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi Indonesia. Sistem manajemen mutu (SMM) pendidikan tinggi (Dikti) telah menerapkan 8 (delapan) prinsip manajemen mutu dalam sistem ISO9001. Pada penerapannya di Dikti ditambahkan 4 (empat) prinsip untuk keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dikti. Implementasi *risk-based thinking* (RBT) dalam ISO 9001:2015 dapat diterapkan dalam pengembangan SMM ITB Swadharma Jakarta dengan mengidentifikasi kemungkinan risiko dalam setiap standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan prinsip pencegahannya. Dengan demikian diharapkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir bahkan jika mungkin diatasi.

Jl. Malaka No.3 Tambora Jakarta Barat
lpm@swadharma.ac.id